

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an

Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. Buku

Cahyadi, Antonius, dan E. Fernando, M. Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1984.

Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hutchinson, Sarah E., dan Stacey Sawyer, *Computers and Information System*. ed. 5. USA: Times Mirror Higher Education Group, 1996.

Kamus Hukum. Jakarta: Citra Umbara, 2008.

Prasetyo, Kukuh Fadli. *Et.al. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas YARSI. Edisi Tahun 2022*. Jakarta: 2022.

Ramli, Samsul, dan Fahrurrazi. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka. 2014.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. cet. 27. Bandung: ALFABETA, 2018.

Syahdeni, Sutan Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. cet. 1. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. cet. 2. Bandung: Keni Media, 2016.

C. Peraturan

Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif*. Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014. BN Tahun 2014 Nomor 1003.

Indonesia. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*. Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. BN Tahun 2020 Nomor 1376.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kementerian Negara*. UU Nomor 39 Tahun 2008. LN Tahun 2008 Nomor 166, TLN Nomor 4916.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 11 Tahun 2008. LN Tahun 2008 Nomor 58, TLN Nomor 4843.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. UU Nomor 27 Tahun 2007. LN Tahun 2007 Nomor 84, TLN Nomor 4739.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*. UU Nomor 27 Tahun 2022. LN Tahun 2022 Nomor 196, TLN Nomor 6820.

D. Jurnal

Apriyani, Rini. “Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam”. *Jurnal of Islamic Law Studies*. Vol. 2, No. 2. 2019. Hal. 27.

Murdijana, Desti. *Et.al.* Risalah Kebijakan. Kelompok Orientasi Seksual Minoritas: Pengakuan Identitas dan Hak. *Komisi Nasional AntiKekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*, 2019, hal. 2-3.

Moha, Mohamad Rivaldi, Sukarmi, dan Afifah Kusumadara. “Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha *E-Commerce*”, *Jambura Law Review*. Vol. 2, Issue No. 02. Juli 2020. Hal. 102.

R., Ibrahim. “Juridiksi Dunia Maya (*Cyberspace*) dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI”, *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*. Issue. Vol. 10, No. 24. September 2003. Hal. 120.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 1. Januari-Maret 2014. Hal. 27.

Syaifuddin, Ahmad, dan Mohammad Muslimin, “Analisis Sentimen Pada Sosial Media Tentang Implementasi Kebijakan PSE Kominfo Menggunakan Algoritme Lexicon Based”. *Prosiding Semastek 2022*. Vol. 1, No. 1. 2022. Hal. 8.

Ulya, Dini. “Pelaksanaan ‘Uqubat Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Maisir di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang (Analisis Terhadap Putusan Nomor 33/JN/2018/MS-KSG)”. *AL-QANUN: Kajian Sosial Dan Hukum Islam*. Vol. 1, No. 1. Juni 2019. Hal. 199.

E. Harian

Riatmoko, Ferganta Indra. “Kedaulatan Siber yang Kebablasan”. *Kompas*. (1 Agustus 2022).

F. Internet

- Detikcom. “Surah An Nisa Ayat 59 Berisi Tentang Apa? Ini Jawabannya”.
<https://news.detik.com/berita/d-5661854/surah-an-nisa-ayat-59-berisi-tentang-apa-ini-jawabannya>. Diakses pada 6 Januari 2023.
- DPR-RI. “Legislator Usulkan PM Kominfo tentang PSE Lingkup Privat Diperkuat”.
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40187/t/Legislator+Usulkan+PM+Kominfo+tentang+PSE+Lingkup+Privat+Diperkuat>. Diakses pada 2 Desember 2022.
- Google Translate. “Cyberspace”.
<https://translate.google.com/?sl=en&tl=id&text=cyberspace&op=translate>.
 Diakses pada tanggal 15 September 2022.
- Human Rights Watch. “Indonesia: Tangguh dan Revisi Permenkominfo No. 5 Tahun 2020”.
<https://www.hrw.org/id/news/2021/05/21/378764>. Diakses pada 2 Desember 2022.
- Hukum Online. “Biar Tak Diblokir, Ini Cara Pendaftaran PSE Lingkup Privat”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/biar-tak-diblokir-ini-cara-pendaftaran-pse-lingkup-privat-lt630dc0d652432>. Diakses pada 7 Desember 2022.
- Hukum Online. “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>. Diakses pada 10 September 2022.
- Hukum Online. “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>. Diakses pada 19 September 2022.
- Kementerian Agama Purbalingga. “Mutiarahadits: Larangan Berbuat Mudharat”.
<https://purbalingga.kemenag.go.id/mutiara-hadits-larangan-berbuat-madharat/>. Diakses pada 6 Januari 2023.
- Kementerian Agama Sumatera Barat. “Problematika LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”.
<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/53670/problematika-lgbt-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-ham>. Diakses pada 27 Desember 2022.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. “Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)”.
<https://apta.kominfo.go.id/2020/01/pendaftaran-penyelenggara-sistem-elektronik-pse/>. Diakses pada 17 September 2022.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. “4.594 PSE Lingkup Privat Telah Mendaftar di Kominfo”.
<https://apta.kominfo.go.id/2022/06/4-594-pse-lingkup-privat-telah-terdaftar-di-kominfo/>. Diakses pada 15 November 2022.

- Kominfo. “Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat”.
https://m.kominfo.go.id/content/detail/43385/siaran-pers-no-308hmkominfo072022-tentang-pendaftaran-penyelenggara-sistem-elektronik-pse-lingkup-privat/0/siaran_pers. Diakses pada 14 November 2022.
- Kominfo. “Pernyataan Kementerian Kominfo Terkait Perkembangan Terbaru Pendaftaran PSE Lingkup Privat”.
https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/43412/siaran-pers-no-309hmkominfo072022-tentang-pernyataan-kementerian-kominfo-terkait-perkembangan-terbaru-pendaftaran-pse-lingkup-privat/0/siaran_pers. Diakses pada 15 November 2022.
- Kominfo. “Profil”. <https://www.kominfo.go.id/profil>. Diakses pada 20 September 2022.
- Kominfo. “Untuk Pendataan dan Kepatuhan, Dirjen Aptika Tegaskan Tanggal Efektif Pendaftaran PSE Lingkup Privat”.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/43171/siaran-pers-no-289hmkominfo072022-tentang-untuk-pendataan-dan-kepatuhan-dirjen-aptika-tegaskan-tanggal-efektif-pendaftaran-pse-lingkup-privat/0/siaran_pers. Diakses pada 14 November 2022.
- Kompas.com. “PayPal Muncul di Halaman Daftar PSE tapi Tetap Diblokir, Ini Penjelasan Kominfo”.
<https://tekno.kompas.com/read/2022/07/31/14450017/paypal-muncul-di-halaman-daftar-pse-tapi-tetap-diblokir-ini-penjelasan-kominfo?page=all#page2>. Diakses pada 1 Desember 2022.
- Kompas.com. “Permenkominfo No 5 Tahun 2020 Berlaku, Perusahaan Digital Wajib Setor Data Pribadi ke Pemerintah”.
<https://tekno.kompas.com/read/2021/05/24/07320047/permenkominfo-no-5-tahun-2020-berlaku-perusahaan-digital-wajib-setor-data?page=all#page2>. Diakses pada 1 Desember 2022.
- Kompas.com. “Sanksi dalam UU ITE”.
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/12/03000081/sanksi-dalam-uu-ite>. Diakses pada 7 November 2022.
- Kompasiana. “Teknologi Cyber, Cyberspace”.
<https://www.kompasiana.com/lamigos/557217f3307a614e38ad23ca/teknologi-cyber-cyberspace>. Diakses pada 15 Agustus 2022.
- Liputan 6. “Daftar PSE yang Diblokir Kominfo Hari Ini: Steam, Paypal, hingga Yahoo”. <https://m.liputan6.com/amp/5028138/daftar-pse-yang-diblokir-kominfo-hari-ini-steam-paypal-hingga-yahoo>. Diakses pada tanggal 24 September 2022.

STID Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. “Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya”. <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>. Diakses pada 6 Januari 2023.

UII Jurusan Informatika. “Pro Kontra Aturan PSE”. <https://informatics.uii.ac.id/2022/08/15/pro-kontra-aturan-pse/>. Diakses pada 15 Desember 2022.

Web Muslimah. “Isi Kandungan Surat An Nisa Ayat 59 dan Terjemahan”. <https://webmuslimah.com/isi-kandungan-surat-an-nisa-ayat-59/>. Diakses pada 6 Januari 2023.

E. Wawancara

Hidayat, M. Taufiq. Wawancara Pribadi dengan Khalifta Zahira Said. 9 November 2022.